

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS DAN AKRUAL STUDI PADA UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

RICKY MAULANA PUTRA

Program Studi Akuntansi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja laporan keuangan berbasis kas dan akrual pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta perbedaan dari kedua laporan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta observasi. Analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar saja, kemudian berbasis akrual meliputi penerapan atas pengidentifikasian, pengungkapan, pencatatan, pengukuran, laporan keuangan pokok. Perbedaan terdiri dari penyusutan aset tetap, entitas akuntansi, entitas pelaporan, peranan laporan keuangan, dan basis akuntansi.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Kas, Akrual.

ABSTRACT

Government Accounting Standards (SAP) are accounting principles applied in compiling and presenting government financial statements. The purpose of this study was to find out the performance of cash-based and accrual financial statements on upt protection and social services of Sidoarjo Toddler Care Of East Java Province as well as differences from the two reports. The types of research conducted are qualitative descriptive research, data collection techniques using interviews and documentation and observations. Data analysis uses qualitative descriptive. The results of the study concluded that the application of cash-based financial statement performance based on cash in and outbound cash only, then accrual-based includes the application of identification, disclosure, recording, measurement, principal financial statements. The difference consists of depreciation of fixed assets, accounting entities, reporting entities, the role of financial statements, and basis accounting.

Keywords: Financial Statements, Cash, Accrual

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2012).

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota, untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Mercy, 2013).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Tanpa adanya

standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bias jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat nasional.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010, salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi daribasis kas menjadi basis akrual, dimanabasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban (Usman, 2014).

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut (Langelo, 2015).

Salah satu bentuk konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ningtyas, 2015).

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dimana pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan, sehingga peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya (Mentu, 2016).

Salah satu perwujudan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari PP No. 24 Tahun 2005. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas (Putra, 2015).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran basis yang ditetapkan dalam APBD (Wiraputra, 2014).

Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Halim dan Kusufi (2012) bahwa dalam pencatatan basis akrual sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah berbasis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun, perubahan yang dianggap lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah (Binsar, 2010). Pernyataan pro-kontra mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terus timbul (Adriana, 2008). Sedangkan pada tahun 2015 seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia seharusnya sudah merubah akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Seperti yang dikemukakan oleh peneliti lain bahwa salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi (Ardiansyah, 2012). Sedangkan Aldiani (2010) berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya komputer dan software akan membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah Apriliani, SE selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bahwa dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah menyajikan komponen laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual, namun dalam penerapannya masih terdapat kelebihan dan kekurangan terkait laporan keuangan tersebut, Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Laporan Keuangan Berbasis Kas Dan Akrual Studi Pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur**

KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Bastian (2010) mengemukakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut: Persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, “standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64/2013 “SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran”. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan sarana informasi (*screen*) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu. Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan suatu aktivitas dari suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal terdiri dari Neraca atau laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Posisi Keuangan.

Basis Akuntansi

Menurut Mursyidi (2009:7) basis akuntansi merupakan standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Jika dikembangkan, basis akuntansi akan menjadi 2 basis, yaitu:

a. Berbasis Kas

Basis kas (*cash bases*) merupakan model pengakuan dalam akuntansi dimana pendapatan diakui, dicatat dan dilaporkan apabila uang sudah diterima oleh kas; dan beban diakui, dicatat, dan dilaporkan apabila uang yang telah dikeluarkan dari kas. Menurut Hiltbeitel (2012), basis kas adalah: *"the cash basis recognizes revenues when collected rather than when earned and expenses when paid rather than incurred. Under the cash basis, long-term assets are not capitalized, and, hence, no depreciation or amortization is recorded. Also, no accruals are made for payroll taxes, income taxes, or pension costs, and no prepaid assets are recorded."* (PSAP No. 01:3) Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis kas, pendapatan diakui ketika kas diterima bukan ketika hak atas pendapatan tersebut timbul dan belanja diakui ketika dibayar bukan ketika kewajiban untuk membayar timbul. Pada basis kas, pembelian aset tetap tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja, sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan

b. Basis akrual

Basis akrual (*accrual bases*) merupakan metode akuntansi dimana mengakui mengakui pendapatan baik yang diterima maupun yang masih harus diterima hanya untuk satu periode akuntansi; dan mengakui beban baik yang telah dikeluarkan uangnya, maupun yang masih harus dikeluarkan hanya untuk satu periode akuntansi. Basis akrual menurut *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) adalah: *"Accrual basis means basis of an accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statement of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses"*. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012:6) Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deproposol dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menjelaskan perbandingan penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas dan akrual pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011 : 80). Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berbasis kas dan akrual pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011 : 81). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan sendiri kriteria sampel yang akan digunakan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berbasis kas dan akrual pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.

Definisi Operasional Variabel

Pada definisi operasional variabel penelitian ini menyangkut kepada beberapa hal antara lain

- :
1. Laporan Keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut.
 2. Menurut (PSAP No. 01:3) Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis kas, pendapatan diakui ketika kas diterima bukan ketika hak atas pendapatan tersebut timbul dan belanja diakui ketika dibayar bukan ketika kewajiban untuk membayar timbul. Pada basis kas, pembelian aset tetap tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja, sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan.
 3. Menurut PP No 71 tahun 2010 Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.

Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan berasal dari dua sumber seperti yang dijelaskan oleh Kuncoro (2009:145) berikut :Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan pimpinan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengenai kinerja laporan keuangan berbasis kas dan akrual pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang diperoleh berupa Profil UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data tersebut antara lain:Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan bersangkutan kemudian dengan Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada pada laporan keuangan berbasis kas dan akrual UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur seperti profil perusahaan. Selanjutnya adalah Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung ke nara sumber sesuai dengan data-data yang diperlukan. Teknik wawancara digunakan untuk menguatkan hasil dari teknik dokumentasi yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, fungsi dokumen dan catatan yang digunakan serta prosedur-prosedur yang membentuk laporan keuangan berbasis kas dan akrual pada UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif, sehingga dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif yakni mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan berbasis kas dan akrual. Dalam menganalisis data kualitatif Sugiyono, (2016:426) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang akan diperoleh di lapangan biasanya berjumlah banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Menurut Sugiyono (2016:431) mereduksi

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Kinerja Laporan Keuangan Berbasis Kas UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Basis kas ini merupakan basis kas yang paling sederhana. Dalam basis ini transaksi ekonomi dan kejadian yang terjadi diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Pengakuan basis kas ini hanya berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar saja selain itu fokus pengukuran hanya pada kas, sehingga di neraca yang dilaporkan hanya akun kas dan ekuitas dana yang ada sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan atas.

2. Penerapan Kinerja Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Dimana PP 71 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam PP nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Pengelolaan keuangan UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menerapkan BLU diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Beberapa peraturan utama yang secara khusus mengaturnya yaitu: (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (5) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, (6) PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dan (7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Penerapan PP No. 71 tahun 2010 dalam pelaporan keuangan UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo yang masih menerapkan *Cash Towart to Acrual*, hal ini diketahui dari metode Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Kepala Sub

Bagian Keuangan, sementara metode kedua yaitu dengan Observasi dengan melihat bagaimana penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada laporan keuangan Tahun 2014 UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, selain itu Kasubag Keuangan menjelaskan penyusunan laporan keuangan yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu:

“Untuk Laporan Keuangan tahun 2014 UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo masih berbasis *Cash Toward To Accrual* terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan, penerapan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo yaitu dengan mengakui pendapatan dan belanja dengan basis kas sementara untuk neraca yaitu aset kewajiban dan Modal pengakuannya dengan basis akrual. Pada periode ini yaitu tahun 2015 UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo mulai menerapkan akuntansi berbasis Akrual pada penyusunan laporan keuangannya. (Kasubag Keuangan Bu Indah Apriliani, SE, 27 November 2019)”

Adapun penerapan atas pengidentifikasian, pengungkapan, pencatatan, pengukuran yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo atas transaksi yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

1. Identifikasi

Tahap pengidentifikasian adalah cara mengklasifikasi transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pengidentifikasian bukti transaksi juga merupakan salah satu langkah awal dari perancangan jurnal langkah-langkah pengidentifikasian tersebut adalah:

Tahap identifikasi adalah tahap penentuan jenis transaksi yang bersumber dari adanya bukti transaksi sehingga dapat diketahui apakah transaksi tersebut dimasukkan dalam jenis transaksi yang sesuai sehingga pencatatan atas transaksi tersebut sesuai dengan jenisnya. Pengidentifikasian atas asset lancar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik transaksi
2. Membuat jurnal standar
3. Merancang jurnal berdasarkan jurnal standar

Adapun tahapan pengidentifikasian transaksi ke dalam jurnal meliputi (Shiro:2015):

- a. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen dan sumbernya
- b. Menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan klasifikasikan berdasarkan jenisnya.
- c. Menetapkan apakah akun-akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi yang ada.
- d. Menetapkan apakah transaksi tersebut harus didebit atau dikredit akunnnya.
- e. Memasukkan transaksi ke dalam buku jurnal.

”untuk pengidentifikasian atas transaksi di UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dapat di Identifikasi dari Transaksi yang telah dilakukann yaitu dari bukti transaksi yang diperoleh kemudian dari bukti transaksi tersebut dimasukkan dalam akun-akun kemudian dilihat dari bukti tersebut apakah apakah tansaksi yang terjadi mengalami pengurangan atau penambahan, kemudian dimasukkan kedalam jurnal sesuai dengan jurnal standar yang ada, sehingga dapat menetapkan dalam debit atau kredit atas transaksi tersebut (Kasubag Keuangan Bu Indah Apriliani, SE, 27 November 2019).”

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan Kasubag Keuangan penyajian laporan Neraca yang disajikan oleh UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dengan menjelaskan laporan keuangan dengan dasar atas laporan keuangan *Cash Towart to Accrual* dimana dalam penyajian untuk neraca disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan atas aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya. Sementara yang sudah dilakukan oleh UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo atas pengakuan aset kewajiban dan ekuitas pengakuannya sudah akrual.

3. Perbedaan penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas akrual pada pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pemaparan penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas dan akrual, maka dapat diuraikan perbedaan antara kedua basis laporan keuangan tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. persamaan dan perbedaan laporan keuangan berbasis kas dan akrual

No	Keterangan	Kas	Akrual
1	penyusutan aset tetap	tidak diuraikan dalam kerangka konseptual	aset yang digunakan pemerintah kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas, seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
2	entitas akuntansi	belum diuraikan mengenai entitas akuntansi	terdapat uraian mengenai entitas akuntansi
3	entitas pelaporan	pemerintah pusat pemerintah daerah satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat / daerah atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan LK menurut Peraturan Per Uuan	selain sebagaimana disebutkan pada CTA, ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan termasuk kementerian negara atau lembaga di lingkungan pusat
4	peranan laporan keuangan	pelaporan diperlukan untuk kepentingan, akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi	pelaporan diperlukan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi serta evaluasi kerja
5	komponen laporan keuangan	laporan keuangan pokok : LRA, Neraca, LAK, dan CaLK laporan bersifat optional : laporan Kinerja keuangan dan Laporan perubahan ekuitas	keuangan pokok meliputi : LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, laporan operasional, LAK, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK
6	basis akuntansi	basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA	basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas

Sumber diolah penulis (2021).

Dengan paradigma menggunakan basis akrual maka dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistim keuangan entitas publik, pengendalian fiskal, manajemen aset yang handal dan akuntabel, pengungkapan informasi yang lebih lengkap, sehingga membantu pengguna dalam pengambilan keputusan serta peningkatan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Konsep akrual basis didasarkan pada dua pilar yaitu:

1. Pengakuan pendapatan : Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, kapan kas / setara kas benar-benar diterima bukan yang utama. Oleh karena itu, dalam basis akrual akan muncul estimasi piutang tak tertagih, karena penghasilan sudah diakui meskipun kas belum diterima.
2. Pengakuan beban: Beban diakui pada saat kewajiban membayar telah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka momen ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

Perbandingan kelebihan dan kekurangan

Basis kas (*cash basis*)

Kelebihan dalam menggunakan basis kas (*cash basis*)

- a. Sebuah pendapatan langsung bisa diakui saat kas diterima.
- b. Tidak memiliki resiko pendapatan tak tertagih.

Kelemahan dalam menggunakan basis kas (*cash basis*)

- a. Informasi yang diberikan tidak akurat, ini dikarenakan hanya menunjukkan posisi keuangan pada saat itu saja.

Basis akrual

Kelebihan pencatatan menggunakan basis akrual

- a. Lebih mudah mengukur aset, kewajiban dan ekuitas.
- b. Informasi yang diberikan jauh lebih akurat, ini dikarenakan dalam setiap terjadinya transaksi, dilakukan pencatatan.

Kelemahan jika menggunakan basis akrual (*accrual basis*)

- a. Kas hasil transaksi tidak bisa ditentukan kapan bisa diterima.
- b. Memiliki resiko pendapatan yang tidak dapat tertagih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Pengakuan basis kas ini hanya berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar saja selain itu fokus pengukuran hanya pada kas, sehingga di neraca yang dilaporkan hanya akun kas dan ekuitas dana yang ada sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan atas laporan keuangan pokok : LRA, Neraca, LAK, dan CaLK, laporan bersifat optional, laporan Kinerja keuangan dan Laporan perubahan ekuitas.
2. Penerapan kinerja laporan keuangan berbasis akrual pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur meliputi penerapan atas pengidentifikasian, pengungkapan, pencatatan, pengukuran, laporan keuangan pokok meliputi : LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, laporan operasional, LAK, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK.
3. Perbedaan penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas akrual pada pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terdiri dari penyusutan aset tetap, entitas akuntansi, entitas pelaporan, peranan laporan keuangan, dan basis akuntansi.
4. Dengan adanya perubahan laporan keuangan berbasis akrual yang dibantu dengan media aplikasi Sistem Informasi Keuangan Berbasis Akrual (SIBAKU) di UPT . Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, kinerja laporan keuangannya menjadi lebih cepat, akurat dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat direkomendasikan beberapa hal antara lain:

1. Berkaitan dengan akuntabilitas, sebaiknya manajemen pengelolaan keuangan UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo lebih mengoptimalkan penggunaan Laporan Keuangan dengan baik dan benar.
2. UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo harus melaksanakan kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.
3. Berkaitan dengan penggunaan basis akrual pelaporan pencatatan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo masih menggunakan tahap tahunan, sebaiknya jika menggunakan pelaporan yang pencatatan dilakukan bulanan atau bahkan 3 bulan sekali karena hal ini lebih bisa meminimalkan pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang digunakan.
4. Berkaitan dengan adanya media aplikasi sebagai alat untuk membuat laporan keuangan, sebaiknya setiap ganti tahun harusnya ada *Update* dan *Database* yang baru, sehingga pencatatan untuk tahun berikutnya tidak menumpuk pada *Database* lama.

DAFTAR PUSTAKA

Agita Motto , Ventje Ilat , Meyli Kalalo. 2017. *Penerapan Accrual Basis Pada Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan Sak Etap Di Koperasi Karyawan PT. Bank Sulut*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi,

- Ardiansyah, dkk. 2012. *Hubungan Informasi Komponen Arus Kas dan Return On Investment Terhadap Return Saham*. Skripsi. Universitas Hasanuddin
- Atmojo, Dwi Priyo. 2018. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Timur Sebelum Dan Setelah Penerapan Accrual Based*. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Binsar H.2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Kongres XI IAI
- Damayanti, Etrin. 2012. *Analisis Implementasi Basis Akrua Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis Cash Towards Accrual Tahun Anggaran 2007 – 2009*. *Jurnal Universitas Indonesia*
- Ezra Paula Mentu Jullie J. Sondakh. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah NO.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*
- Ferryono, Baries dan Sutaryo. 2017. *Manfaat Akuntansi Basis Akrua dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrua dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah*. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi 3. Salemba 4
- Harahap, Sofyan Safri. 2011. *Teori akuntansi Edisi Revisi 2011*: Rajawali Pers. Jakarta.
- Hiltebeitel, Kenneth M. 2012. *A look at the modified cash basis (Accounting)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan. PSAK*. Cetakan Keempat. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lamonisi, Sony. 2016. *Analisis penerapan standar akuntansi berbasis akrua pada Pemerintah Kota Tomohon*. *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 1 : 223-230
- Langelo, Friska dkk. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*.
- Mardiasmo, 2012, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mercy, Pricilia Suoth. 2013. *Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung*. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama.
- Ningtyas, Pravitasari Eka, 2015. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, dalam *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, Vol. 4 Nomor 1.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat

- Pristiani. 2015. *Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) BERBASIS AkruaI Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Jabatan (Studi pada Dinas Se-Kabupaten Pematang)*
- Putra, Aditya. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan pt Indofood Sukses Makmur Tbk Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Volume 4, Nomer 3, Maret.
- S. Munawir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Manajemen Kuantitatif, Kualitatif*. Cetakan ke -23. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Usman. Bahtiar. 2014. "*Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Bank-Bank di Indonesia*". Media Riset & Manajemen, Vol.3, No.1, pp.59-74.
- Wibowo, Olivien Titania Aisha Aji, Wita Ramadhanti, Sugiarto . 2018. *Analisis Pendapatan Accrual Basis Dan Cash Basis Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
- Wijaya, Henryanto. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313-323
- Wiraputra, Wayan Kusuma, Sinarwati, Ni Kadek, Nyoman Trisna Herwati, 2014. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Klungkung)*. E-jurnal S1 Ak, Volume 2, Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja